



# MAHKAMAH AGUNG RI BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP : (021) 3843348, 3810350, 3457611 (Hunting)  
TROMOL POS NO. 1020 - JAKARTA 10010

Nomor : 11/KU.01/09/2014  
Lampiran : 1 (satu) set  
Hal : Laporan Hasil Kegiatan Monitoring dan Evaluasi  
di Wilayah Jawa Tengah

Yth. Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Semarang  
Sebagai Penanggungjawab Koordinator Wilayah Jawa Tengah  
Jl. Hanoman 18, Semarang

Dalam rangka persiapan penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014 dan mendukung Program Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung, Biro Keuangan dan Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung melaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi atas penyusunan Laporan Keuangan pada Satuan Kerja di wilayah Jawa Tengah.

Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan di wilayah Jawa Tengah selama 6 hari, mulai tanggal 22 sampai dengan 27 September 2014, kami laporkan sebagai berikut:

## A. Tujuan Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi

Mahkamah Agung sebagai Lembaga Tertinggi Negara, bertindak sebagai Pengguna Anggaran/Barang serta mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan kepada Presiden melalui Menteri Keuangan. Guna mengawal penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung di Koordinator Wilayah Jawa Tengah perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi yang bertujuan untuk:

- Monitoring kesamaan data Saldo Awal Tahun 2014 terhadap Saldo Akhir Tahun 2013 (*Audited*)
- Monitoring mutasi data BMN (Barang Milik Negara) antara SAKPA (Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran) dengan SIMAKBMN (Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara) tahun berjalan (Januari s.d. Agustus tahun 2014)
- Monitoring DBR (Daftar Barang Ruang) dan DBL (Daftar Barang Lainnya)
- Monitoring kesesuaian KIB (Kartu Identitas Barang) dengan nilai akhir aset
- Monitoring perubahan kondisi aset yang rusak berat dengan penghentian aset dalam penggunaan
- Monitoring pembebanan mata anggaran pada LRA (Laporan Realisasi Anggaran) Pendapatan dan LRA Belanja (Januari s.d. Agustus tahun 2014) untuk menghindari kesalahan pembebanan akun
- Mengevaluasi penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Semester I Tahun 2014 pada 75 Satuan Kerja di wilayah Jawa Tengah.

## B. Ruang Lingkup

Kegiatan monitoring dan evaluasi yang bertujuan sebagaimana tersebut di atas pada 75 Satuan Kerja di wilayah Jawa Tengah hanya dilaksanakan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) 005.01 sedangkan untuk DIPA 005.03, 005.04, dan 005.05 tidak dilaksanakan monitoring dan evaluasi oleh Biro Keuangan dan Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung karena berada dalam lingkup monitoring dan evaluasi dibawah Eselon I (Direktorat Jenderal Badan Peradilan) masing-masing.

## **C. Kegiatan Yang Dilaksanakan**

### **1. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan**

Hari : Senin s.d. Jumat  
Tanggal : 22 s.d. 27 September 2014  
Tempat pelaksanaan : Ramayana Room Hotel Patra Jasa, Semarang.

### **2. Pelaksana kegiatan**

- 1 (satu) orang Pembina Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, Kepala Bagian Akuntansi
- 1 (satu) orang Sekretaris dari Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, Kepala Sub Bagian Akuntansi
- 5 (lima) orang Operator dari Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, Staf Bagian Akuntansi
- 4 (empat) orang Operator dari Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, Staf Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara
- 1 (satu) orang staf dari Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, Staf Bagian Pemeliharaan IT
- 1 (satu) orang staf dari Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, Staf Bagian Akuntansi

### **3. Peserta kegiatan**

Peserta kegiatan monitoring dan evaluasi berasal dari 75 Satuan Kerja di wilayah Jawa Tengah, berjumlah 150 orang yang merupakan Operator SIMAKBMN dan Operator SAKPA.

### **4. Pembiayaan**

Kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka persiapan penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2014 yang dilaksanakan di Ruang Arjuna 1 dan Ruang Ramayana Hotel Patra Jasa Semarang, dibebankan pada:

- 1) DIPA Pengadilan Tinggi Agama Semarang T.A. (Tahun Anggaran) 2014 untuk konsumsi selama kegiatan
- 2) DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung T.A. 2014 pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi untuk Tim Monitoring dan Evaluasi dari Badan Urusan Administrasi
- 3) DIPA masing-masing Satuan Kerja T.A. 2014 untuk Peserta/Operator SAKPA dan SIMAKBMN masing-masing Satuan Kerja.

## **D. Sasaran Kegiatan**

Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan monitoring dan evaluasi adalah memperbaiki selisih atau kesalahan pencatatan dan penyajian data keuangan maupun data BMN sampai dengan bulan Agustus tahun 2014, serta memperbaiki penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Semester I Tahun 2014 dengan berhadapan langsung dengan para Operator SIMAKBMN dan Operator SAKPA.

## **E. Hasil Monitoring dan Evaluasi Atas Aplikasi SAKPA Dan SIMAKBMN**

### **1. Analisa terhadap data SAKPA**

#### **a. LRA Pendapatan**

Masih terdapat selisih saldo awal LRA Pendapatan pada beberapa Satuan Kerja. Hal ini kemungkinan dikarenakan perbedaan tingkat rekonsiliasi dengan SAU (Sistem Akuntansi Umum) pada tahun 2013, yaitu tingkat Satuan Kerja-KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara), Koordinator Wilayah-Kanwil (Kantor Wilayah) DJPb (Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara), Eselon I-DJPb, dan Kementerian/Lembaga-DJPb.

b. LRA Belanja

Masih terdapat selisih saldo awal LRA kecuali pada beberapa Satuan Kerja. Hal ini kemungkinan dikarenakan perbedaan tingkat rekonsiliasi dengan SAU pada tahun 2013, yaitu tingkat Satuan Kerja-KPPN, Koordinator Wilayah-Kanwil DJPb, Eselon I-DJPb, dan Kementerian/Lembaga-DJPb.

c. Neraca

- 1) Terdapat beberapa Satuan Kerja yang memiliki selisih saldo awal Neraca tahun 2014 terhadap saldo akhir Neraca tahun 2013 (*audited*) pada akun-akun akrual
  - 2) Terdapat beberapa Satuan Kerja yang belum melakukan jurnal balik akun-akun akrual
  - 3) Terdapat beberapa Satuan Kerja yang belum melakukan jurnal balik akun akrual Semester I tahun 2014
  - 4) Sudah tidak ditemui Satuan Kerja dengan selisih saldo Neraca periode berjalan tahun 2014 antara SAKPA dan SIMAKBMN.
- Setiap penyebab selisih saldo neraca tersebut telah dikoreksi dan selesai.

## 2. Analisa terhadap data SIMAKBMN

Hasil monitoring dan evaluasi terhadap aplikasi SIMAKBMN pada seluruh Satuan Kerja di wilayah Jawa Tengah sampai dengan bulan Agustus tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Saldo Awal/Audited tidak bergeser
- b. Terdapat Satuan Kerja yang belum update aplikasi SIMAKBMN
- c. Terdapat aset tanah yang belum ada sertifikatnya
- d. Terdapat Satuan Kerja yang belum balik nama sertifikat tanah
- e. Terdapat aset tanah dengan nilai luasan yang berbeda antara yang tercatat di Laporan dengan yang tercatat pada KIB
- f. Terdapat luasan tanah 1 m<sup>2</sup>
- g. Terdapat Satuan Kerja yang asetnya mempunyai nilai Rp1,- pada LBMN
- h. Masih terdapat Satuan Kerja dengan KIB-nya belum diperbarui dan dilengkapi dengan data dan informasi sesuai kondisi aset terakhir
- i. Terdapat Satuan Kerja yang belum mendistribusikan barang ke DBR, DBL ataupun KIB
- j. Terdapat Satuan Kerja yang mempunyai kode barang termasuk pada kelompok alat pertanian, alat kesehatan, alat laboratorium, dan alat persenjataan
- k. Terdapat Satuan Kerja yang tidak menginput hasil opname fisik pada aplikasi persediaan
- l. Terdapat Satuan Kerja yang memiliki nilai persediaan negatif
- m. Terdapat Satuan Kerja yang memiliki selisih nilai persediaan antara yang tercatat pada aplikasi persediaan dengan SIMAKBMN
- n. Terdapat Satuan Kerja yang pencatatan tipe rumah negara tidak sesuai dengan luas bangunan berdasarkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2008
- o. Terdapat pencatatan gedung pada laporan SIMAKBMN yang tidak sesuai dengan jumlah fisiknya
- p. Terdapat Satuan Kerja dengan aset yang bernilai negatif
- q. Terdapat Satuan Kerja yang melakukan pencatatan ganda aset pada laporan
- r. Terdapat Satuan Kerja yang mencatat hasil perolehan dari Mahkamah Agung pada daftar barang pihak ketiga
- s. Terdapat Satuan Kerja yang memiliki barang rusak berat tetapi belum dihentikan penggunaannya
- t. Terdapat Satuan Kerja yang mencatat penambahan nilai aset menjadi aset baru
- u. Terdapat 6 Satuan Kerja yang telah melakukan penatausahaan aset pada SIMAKBMN dengan baik dan tidak ada temuan.

Dari hasil monitoring dan evaluasi di atas, masih terdapat beberapa kekurangan dalam penatausahaan aset dan Aplikasi SIMAKBMN serta pengelolaan transaksi keuangan dan Aplikasi SAKPA pada sebagian besar Satuan Kerja di wilayah Jawa Tengah. Sebagian kekeliruan dalam Aplikasi SIMAKBMN dan SAKPA sudah dikoreksi oleh Tim Monitoring dan Evaluasi. Namun demikian peran Koordinator Wilayah sangat dibutuhkan dalam hal sosialisasi peraturan-peraturan terkini, pembinaan SAI (Sistem Akuntansi Instansi), yaitu SIMAKBMN dan SAKPA serta pelaporannya, konsultasi kendala-kendala terkait SAI, dan monitoring serta evaluasi laporan dan aplikasi.

#### **F. Monitoring Dan Evaluasi Atas Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja**

Berdasarkan monitoring dan evaluasi atas penyusunan Laporan Keuangan seluruh Satuan Kerja di wilayah Jawa Tengah, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- Seluruh Satuan Kerja sudah menggunakan Aplikasi Komdanas namun beberapa Satuan Kerja belum melakukan editing secara manual mengingat pencatatan nilai saldo aset pada Aplikasi Komdanas belum seluruhnya benar secara otomatis, seperti mutasi, rincian kas di bendahara pengeluaran baik Tunai Kas maupun Tunai di Bank yang harus diedit dan disesuaikan
- Seluruh Satuan Kerja telah menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
- Kata Pengantar dan SOR (Pernyataan Tanggungjawab) beberapa Satuan Kerja belum ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran diantaranya PA Karanganyar, PA Slawi, PA Pemalang, PN Brebes sedangkan yang menandatangani tapi melewati tanggal pelaporan diantaranya PA Batang, PA Blora, PN Pati, PN Wonosobo, PA Batang, PA Probalinga, dan PN Blora
- 74 Satuan Kerja telah menyusun penjelasan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dengan benar yaitu Penjelasan Pos-Pos LRA dengan membandingkan periode 30 Juni 2014 dengan 30 Juni 2013, dan Penjelasan Pos-Pos Neraca dengan membandingkan 30 Juni 2014 dengan 31 Desember 2013, tetapi 1 (satu) Satker yaitu PA Sragen masih salah membandingkan LRA 30 Juni 2014 Dengan 31 Desember 2013
- Satuan Kerja masih kurang teliti dalam pencantuman saldo dalam Laporan Keuangan, terdapat saldo Laporan Keuangan berbeda dengan ADK Aplikasi SAKPA, hal ini terjadi karena Laporan Keuangan disusun tetapi kemudian ADK berubah akan tetapi tidak dilakukan perbaikan ulang pada Laporan Keuangan atau diupload kembali dalam Komdanas berupa backup ADK yang sudah benar
- Beberapa Satuan Kerja Lampiran pendukung Laporan Keuangan masih kurang lengkap berikut Lampiran Tabel Perhitungan Aset berupa Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku
- Seluruh Satuan Kerja belum menyampaikan data dukung sesuai format surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4169/PB/2014 tanggal 2 Juli 2014 Perihal Penyampaian Laporan Keuangan Semester I 2014.

Hasil evaluasi lebih detail terdapat pada lampiran.

#### **G. Kesimpulan**

- Kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka persiapan penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2014 di wilayah Jawa Tengah berjalan dengan baik dan lancar, sehingga *output* dan *outcome* kegiatan ini dapat tercapai dengan baik
- Masih ditemukan kekeliruan atau kesalahan dalam pengelolaan Aplikasi Persediaan, SIMAKBMN, dan SAKPA
- Masih terdapat kekurangan dalam pengelolaan aset
- Tidak terdapat kekeliruan dalam hal penyerapan/realisasi anggaran pada LRA Belanja dan LRA Pendapatan

- Pengelolaan pelaporan keuangan telah dilakukan dengan baik dan benar karena sudah tidak ditemui selisih saldo Neraca periode berjalan sampai dengan bulan Agustus tahun 2014 antara SAKPA dan SIMAKBMN. Pengelolaan pelaporan keuangan dapat dikatakan telah dilakukan dengan baik dan benar karena hal ini merupakan salah satu indikator utamanya
- Dalam hal penyusunan Laporan Keuangan, Satuan Kerja sudah menggunakan Aplikasi Komdanas dan sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
- Dalam hal data pendukung Laporan Keuangan, beberapa Satuan Kerja masih kurang lengkap lampirannya
- Dengan evaluasi serta sosialisasi pedoman serta peraturan terbaru dalam pelaporan keuangan, Satuan Kerja telah mampu menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan No. PER-57/PB/2013 dan peraturan-peraturan terkait
- Berdasarkan hasil evaluasi, 5 Satuan Kerja telah melakukan pengelolaan SAI (Aplikasi Persediaan, SIMAKBMN, dan SAKPA), penatausahaan dan pemanfaatan BMN dengan baik dan benar, serta sesuai peraturan yang berlaku, yaitu Pengadilan Negeri Purbalingga, Pengadilan Agama Demak, Pengadilan Agama Wonosobo, Pengadilan Agama Surakarta, Pengadilan Agama Slawi.

#### H. Saran

- Rekomendasi yang diberikan selama kegiatan monitoring dan evaluasi untuk dilaksanakan dan dilakukan monitoring oleh Koordinator Wilayah
- Dilakukan rekonsiliasi internal bulanan secara rutin antara Operator SAKPA dan SIMAKBMN. Hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Internal guna mempertahankan validitas pencatatan aset baik pada SAKPA maupun SIMAKBMN
- Dalam hal pencatatan dan perhitungan, agar tetap cermat dan teliti guna mendukung pelaporan yang baik dan handal
- Memperbaiki proses penatausahaan aset dan penertiban terhadap aset-aset yang digunakan yang berada dalam penguasaannya
- Melakukan opname fisik barang persediaan dan menuangkannya dalam Berita Acara Opname Fisik Barang Persediaan serta menginputnya dalam Aplikasi Persediaan
- Untuk terus menjaga kualitas pertanggungjawaban keuangan, penatausahaan BMN maupun penyusunan Laporan Keuangan untuk dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian.

Demikian laporan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi. Usaha maksimal telah dilakukan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi di seluruh Satuan Kerja di wilayah Jawa Tengah. Namun demikian dalam pelaksanaan kegiatan pasti terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu koreksi dan dukungan konstruktif kami harapkan dari semua pihak demi kesempurnaan kegiatan ini dimasa mendatang.

Atas bantuan dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris,

Semarang, 27 September 2014  
Ketua Tim,  
Kepala Bagian Akuntansi Biro Keuangan,

**I.G.N. DARMA PUTRA, S.H.**  
NIP. 19630604 199403 1 004

**TJAHYONO, S.H.**  
NIP. 19620106 198803 1 001

Ketua Tim SIMAKBMN K/L,

**ARIF SETIADI, A.Md.**

NIP. 19800807 200805 1 001

Pelaksana SIMAKBMN K/L,

**YUDI CAHYADI, S.T.**

NIP. 19770716 200604 1 006

Pelaksana SIMAKBMN K/L,

**M. SAM UMAR WIRAHARJA, S.Kom.**

NIP. 19830324 201101 1 005

Pelaksana SIMAKBMN K/L,

**ADI MARDIANSYAH, S.Kom.**

NIP. 19880325 201101 1 012

Pelaksana Laporan Keuangan,

**JUWAN JUSLIWAN AL FAUZ, S.E.**

NIP. 19790424 200904 1 007

Ketua Tim SAPA,

**AHMAD KHOMAENI, A.Md.**

NIP. 19811110 200604 1 004

Pelaksana SAPA,

**NUGROHO URIP WIDODO, S.E., M.M.**

NIP. 19800523 200912 1 002

Pelaksana SAPA,

**FITA RUSFANDARI, S.E., M.M.**

NIP. 19841219 200904 2 004

Pelaksana SAPA,

**IGNASIA SEKAR A.P., S.E.**

NIP. 19870119 201101 2 019

Pelaksana Laporan Keuangan,

**HAMSARIP ONGSO, S.HI.**

NIP. 19750706 200312 1 002

Tembusan:

1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
3. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
4. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
5. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang
6. Arsip.